

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.
- Andes, A. M. (2025). *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Arief, (2023). *Nuansa Perdata Dalam Perkara Pidana*. Jakarta. MCL Publisher.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*. UMMPress, Malang 2023.
- Da Santo, M. F. O., Sari, L., Kamilah, A., & Reumi, F. (2024). *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jambi PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ecep Nurjamal (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi Uu Kuhp Baru*. Edu Publisher.
- Fitri, Wahyuni. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Rajawali Pres, Depok 2021.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta. Nusamedia.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Husamuddin MZ; Sumardi Efendi; Syaibatul Hamdi; Ida Rahma; dkk. *Buku Referensi Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber*. PT Media Penerbit Indonesia, Medan 2024.
- Japansen Sinaga, Rolib Sitorus, Bisdan Sigalingging, *Hukum Acara Pidana*. UMSU Press, Medan 2024.
- Julista Mustamu (2025). *Buku Diskresi Dalam Pemerintahan: Hak, Batas dan Konsekuensi Hukumnya*. Penerbit Widina.
- Rizkia, N. D., Nazmi, N., Mulyana, Y., Purba, T. L. D., Jayadi, H., Silalahi, F., ... & Saragi, P. *Buku Hukum Acara Pidana*. Penerbit Widina.

Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sofyan, Andi Muhammad, Asis, Abd, Ilyas, Amir, *Hukum Acara Pidana (Edisi Ketiga)*. Prenada Media Group / Kencana, Jakarta 2020

Tanjung, F. (2019). *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi*. Media Sahabat Cendekia.

Jurnal

Adawiyah, Rodiatul, and Evi Wulan. "Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan" 2024.

Adolph, Ralph. "Tinauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Fasilitas Umum" 2016.

Akbar, Muhammad. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem" 51, no. April (2022).

Amiruddin, Amiruddin, Rina Khaerani Pancanigrum, and Chrisdianto Eko Purnomo. "Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata." *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (2021).

APRIANI, TITIN. "Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Ganec Swara* 16, no. 1 (2022).

Arafat, Muhammad. "Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Prinsip Accusatoir" 22, no. 1 (2020).

Bagaskoro, Ladito R. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia" n.d., 190–206.

Bahwono, Hendi, and Asri Agustiwi. "Peran dan Fungsi Balai Pemasarakatan pada Fase Pra-Ajudikasi dalam Integrated Criminal Justice System sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan" 3, no. 10 (2024).

Daharis, Ade, Sri Herlina, Nining Suningrat, and Yulianis Safrinadiya Rahman. "Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan The Rights of Suspects and Defendants in the Trial Process" 7, no. 6 (2024).

Dekafela, Karina. "Analisis Yuridis Terhadap Letter c Sebagai Alas Hak Dalam Memperoleh Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah," 2023.

- Hafina, Mutia. "Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Investigation Process In The Criminal Justice System". Vol 4. No. 7 (2023).
- Hamika, Syahri. "Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Manusia milik Tersangka dalam Proses Peradilan" 2024.
- Kreasi, D R A Cipta. *Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, 2025.
- Krismantoro, Damianus. "Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah : Reforma Agraria Di Indonesia" 6, no. 3 (2022).
- Kusumastuti, Ely. "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika* 33, no. 1 (2018).
- Loa, Fabian Christian, Deizen D Rompas, and Betsy Anggreni Kapugu. "Kajian Hukum Lembaga Pra-Peradilan dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatam*. Vol. 13, 2024.
- M. Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. "Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Manusia milik Tersangka dalam Proses Peradilan" 5, no. 12 (2024).
- Mhd. Anzor Lubis 1, Muhammad Yasin Ali Gea 2, & Nur Muniifah. "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana." *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari* 5, no. 2 (2020).
- Mutjaba, Khairullah Al. "Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Proses Peradilan Di Indonesia Saat Ini Dan Ke Depan (Studi Kasus Dengan Terdakwa Ferdy Sambo)," 2023.
- Mustakim, Farid, Dani Kusuma, Rafifa Khairunisa, Khofifa Wardani, Revalina Sukirman, and Irsyaad Ulhaq. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari" 2, no. 2 (2025).
- Nggelapa, P. "Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Terhadap Sah atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan" 2023.
- Oheo Kaimuddin Haris. "Penangguhan Putusan Perkara Pidana Melalui Putusan Sela Oleh Hakim Dengan Alasan Menunggu Putusan Perkara Perdata (Studi Putusan Sela Pengadilan Nomor 143 / Pid . B / 2021 / PN . Kdi) Suspension of Criminal Case Decision Through Intermediate Decision by Judge with the Reason Waiting for Decision in Civil Case (Study of Interlocutory Court" 5, no. 1 (2023).
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam

Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia” 4 (2022).

Putri, Safira Diana. “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” 2002.

Queen, Oleh, Aisyah Annastasya, Aulia Salsabila, Dwi Farantika, Azahra Wulandari Hardini, and Aditya Aji. “Upaya Hukum Praperadilan Dalam Lingkup Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” n.d.

Rakian, Jovan J. S. T. Y. “Hak-Hak Tersangkad dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana” V, no. 2 (2016).

Ramadhan, Alfano. “Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana,” 2021.

Runtuuwu, Yoan Barbara, Morais Barakati, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Negeri Manado. “Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” 1, no. 1 (2024).

Rusman Sumadi. “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021).

Seroja, Mutiara. “Perbandingan Hukum Perdata dengan Hukum Pidana,” n.d.

Sucy, Cyta, Marrismawati Arini, Asriyani Muhammad, and Rusdi Suprpto. “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif” 11, no. 2018 (2024).

Sugistiyoko, Bambang. “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana” 1, no. 1 (2020).

Thalib, Hambali, and Askari Razak. “Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024).

Tio, Jenifer, and Novalna Br. “Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan” 8, no. 1 (2024).

Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018).

Zefanya, Audry, and Fransiscus Xaverius Arsin Lukman. “Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

